

EFEK PENDIDIKAN LITERASI ANTI-KORUPSI TERHADAP ETIKA KERJA TENAGA KESEHATAN

Zahra Nabilah ¹, Siti Bella ², Sucy Cantika Azhara ³, Ilham Hudi ⁴, Sofi Nabila Doni ⁵,
Ferdy Aland Pradana ⁶

Universitas Muhammadiyah Riau

E-mail: zahrnabilah477@gmail.com

Abstrak (Indonesia)

Korupsi dalam sektor kesehatan masalah serius yang dapat merusak integritas sistem kesehatan dan mengurangi kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Tujuan penelitian untuk mengetahui efek pendidikan literasi anti-korupsi terhadap etika kerja tenaga kesehatan. Penelitian menggunakan metode kajian pustaka melibatkan penyelidikan terhadap 43 artikel dan jurnal yang dipublikasikan antara tahun 2020 hingga 2024. Adapun peneliti adalah peningkatan kesadaran etika kerja yaitu pendidikan anti-korupsi berhasil meningkatkan kesadaran tenaga kesehatan mengenai pentingnya menjaga integritas dan etika profesional dalam pekerjaan mereka. Peningkatan kepercayaan pasien dan masyarakat yaitu ketika tenaga kesehatan mematuhi prinsip-prinsip anti-korupsi, kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan meningkat.

Sejarah Artikel

Submitted: 13 Januari 2025

Accepted: 19 Januari 2025

Published: 20 Januari 2025

Kata Kunci

*Pendidikan, Anti-Korupsi,
Etika, Kesehatan*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan fenomena yang merusak tatanan masyarakat dan menghambat proses pembangunan. Dalam masyarakat modern, korupsi tidak hanya meluas, tetapi juga semakin kompleks, sehingga menuntut usaha penanggulangan yang lebih serius dan sistematis. Meskipun pemberantasan korupsi menjadi prioritas, tantangan yang dihadapi sangat besar, termasuk dalam hal mendeteksi, mencegah, dan menindak para pelaku kejahatan ini. Usaha yang efektif diperlukan untuk memerangi korupsi agar dampak negatifnya terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat bisa diminimalisir (Madani, et al., 2024).

Korupsi juga dapat menyebabkan penyimpangan dana dari program-program sosial yang seharusnya memberikan manfaat kepada masyarakat. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan masyarakat, seperti program kesehatan, pendidikan, atau bantuan sosial, bisa disalahgunakan atau dialihkan untuk kepentingan pribadi (Fernanda et al., 2023). Korupsi dalam sektor kesehatan adalah masalah serius yang dapat merusak integritas sistem kesehatan dan mengurangi kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Dalam konteks tenaga kesehatan, korupsi dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti suap, penyalahgunaan wewenang, penggelapan dana, hingga kolusi dalam pengadaan barang dan jasa. Praktik-praktik tersebut tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak negatif pada kesejahteraan pasien, yang seharusnya menjadi fokus utama dalam penyediaan layanan kesehatan.

Pentingnya pendidikan anti-korupsi tidak dapat disangkal, terutama dalam upaya membentuk integritas, meningkatkan kesadaran, dan mengembangkan kemampuan kritis di tengah masyarakat. Tidak dapat diabaikan bahwa korupsi telah menjalar sebagai masalah global yang menghantui berbagai negara, merongrong fondasi demokrasi, tata pemerintahan yang baik, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Yandi et al., 2024). Korupsi, dalam berbagai manifestasinya, menyebabkan degradasi struktural dan ekonomi suatu negara. Implikasinya tidak hanya berdampak langsung terhadap keterbatasan akses terhadap layanan publik yang adil, tetapi juga menghambat arus investasi serta membuka pintu bagi peningkatan

ketidaksetaraan. Oleh karena itu, pendidikan anti-korupsi memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk masyarakat yang inklusif, transparan, dan berintegritas (Arfa, 2023).

Pentingnya menjaga integritas dan etika kerja tenaga kesehatan menjadi sorotan utama, mengingat peran mereka yang sangat vital dalam penyelamatan dan pemeliharaan kesehatan masyarakat (Ananta et al., 2024). Oleh karena itu, peningkatan pemahaman mengenai literasi anti-korupsi bagi tenaga kesehatan menjadi hal yang sangat mendesak. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui pendidikan literasi anti-korupsi yang memberikan pengetahuan, pemahaman, serta kesadaran mengenai bahaya korupsi dan dampaknya terhadap sistem kesehatan.

Usaha untuk mengurangi dan membasmi tindak pidana korupsi sudah dilakukan secara terus-menerus sejak Indonesia merdeka, bahkan ketika negara ini masih berada di bawah penjajahan Kolonial Belanda (Dianita et al., 2024). Namun, hingga saat ini, korupsi tetap ada dan tidak pernah berhenti, apalagi hilang sama sekali. Berbagai kendala teknis dan strategis yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap korupsi sesungguhnya terletak pada konsep dan metode penegakan hukum yang diterapkan. Ini mencakup aspek substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum (Sari et al., 2021).

Pendidikan literasi anti-korupsi diharapkan dapat mendorong tenaga kesehatan untuk meningkatkan kesadaran etika kerja, mengurangi potensi praktik korupsi, dan memperkuat komitmen mereka terhadap kode etik profesi yang telah ditetapkan (Kurnia & Soeratin, 2023). Pendidikan semacam ini juga berperan dalam membangun nilai-nilai profesionalisme yang berfokus pada pelayanan yang jujur, transparan, dan akuntabel, serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

Namun, meskipun banyak pihak yang menyadari pentingnya upaya pencegahan korupsi di sektor kesehatan, masih belum banyak penelitian yang secara khusus mengeksplorasi hubungan antara pendidikan literasi anti-korupsi dan perubahan etika kerja tenaga kesehatan (Muhammaf Fauzan, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis efek pendidikan literasi anti-korupsi terhadap etika kerja tenaga kesehatan, dengan harapan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan dan strategi dalam upaya mencegah korupsi di sektor kesehatan.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya pendidikan literasi anti-korupsi sebagai bagian dari upaya membangun budaya kerja yang bersih, transparan, dan profesional di sektor kesehatan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun rumusalah masalah dalam penelitian adalah bagaimana efek pendidikan literasi anti-korupsi terhadap etika kerja tenaga kesehatan. dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efek pendidikan literasi anti-korupsi terhadap etika kerja tenaga kesehatan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah metode penelitian pustaka. Dalam penelitian ini berfokus pada pengumpulan dan analisis literatur yang relevan untuk mendalami hubungan antara pendidikan literasi anti-korupsi dan etika kerja tenaga kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka yang melibatkan penyelidikan terhadap 43 artikel dan jurnal yang dipublikasikan antara tahun 2020 hingga 2024. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat memperoleh wawasan yang komprehensif tentang bagaimana pendidikan anti-korupsi dapat membentuk sikap, perilaku, dan profesionalisme tenaga kesehatan, serta bagaimana dampaknya terhadap sistem kesehatan secara keseluruhan. Penelitian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep yang terlibat,

serta untuk mengidentifikasi penelitian-penelitian sebelumnya yang dapat memberikan wawasan tentang dampak pendidikan anti-korupsi terhadap etika kerja tenaga kesehatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

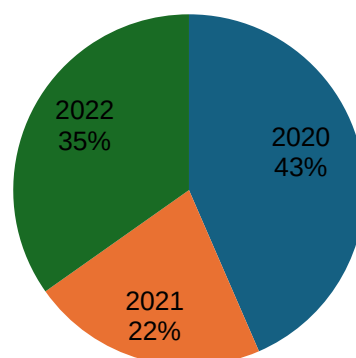
1. Hasil Pencarian Data Publikasi Artikel Korupsi dalam Pendidikan Kewarganegaraan Berdasarkan data penelitian tentang Pendidikan Anti-Korupsi terhadap etika kerja tenaga kesehatan dengan menggunakan metode Kajian Pustaka, serta melakukan analisis menggunakan pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif.

Kajian pustaka adalah langkah pertama dalam penelitian ini, ada 26 penelitian yang terkait dengan kajian pustaka tentang topik ini. Kajian pustaka biasanya mencakup penelitian-penelitian sebelumnya, buku, artikel jurnal, dan laporan yang membahas teori, konsep, dan temuan terkait dengan pendidikan anti-korupsi, etika tenaga kesehatan, serta kaitannya dengan praktik korupsi dalam sektor kesehatan. Dengan kata lain, 26 kajian pustaka berfokus pada pemahaman teoretis dan literatur yang sudah ada mengenai topik ini.

Pendekatan kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti, tanpa mengutamakan angka atau data statistik ada, 21 penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam dan analisis yang lebih subjektif mengenai fenomena yang diteliti, seperti wawancara mendalam, studi kasus, atau diskusi kelompok. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian dalam bidang ini lebih tertarik untuk menggali pengalaman, pandangan, dan persepsi tenaga kesehatan terhadap pendidikan anti-korupsi serta dampaknya terhadap etika kerja mereka.

Sementara itu, ada 2 penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif mengandalkan data yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik, seperti survei atau eksperimen. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur hubungan atau pengaruh pendidikan anti-korupsi terhadap perubahan sikap dan perilaku tenaga kesehatan menggunakan data numerik dan analisis statistik.

**DIAGRAM PENDIDIKAN LITERASI ANTI-KORUPSI
TERHADAP ETIKA KERJA TENAGA KESEHATAN**



Gambar 1. Metode yang digunakan dalam penelitian Pendidikan Anti-Korupsi terhadap etika kerja tenaga kesehatan

Penelitian mengenai korupsi dalam Pendidikan Anti-Korupsi terhadap etika kerja tenaga kesehatan menjadi sangat relevan untuk memahami bagaimana praktik korupsi dapat mempengaruhi sistem etika kerja tenaga kesehatan, serta untuk mencari solusi guna

mengurangi dampak negatifnya. Data yang ada menunjukkan adanya fluktuasi jumlah penelitian mengenai isu ini dalam lima tahun terakhir (2020-2024). Jumlah penelitian tentang Pendidikan Anti-Korupsi terhadap Etika Kerja Tenaga Kesehatan dari 2020 hingga 2024:

Tabel 1. Data Jumlah Penelitian Pendidikan Anti-Korupsi terhadap etika kerja tenaga kesehatan

Tahun	Jumlah
2020	10
2021	5
2022	8
2023	7
2024	9



Gambar 2. Jumlah Penelitian Pendidikan Anti-Korupsi terhadap etika kerja tenaga kesehatan 2020-2024

Pada di atas data jumlah penelitian mengenai korupsi dalam Pendidikan Anti-Korupsi terhadap etika kerja tenaga kesehatan dari tahun 2020 hingga 2024.

a. 2020 (10 penelitian)

Tahun 2020 memiliki jumlah penelitian terbanyak dengan 10 penelitian yang berkaitan dengan pendidikan anti-korupsi dan etika kerja tenaga kesehatan. Ini bisa menunjukkan bahwa tahun tersebut merupakan titik awal atau peningkatan minat dalam penelitian tentang topik ini. Mungkin pada tahun ini, perhatian terhadap pentingnya pendidikan anti-korupsi di sektor kesehatan mulai meningkat.

b. 2021 (5 penelitian)

Jumlah penelitian pada tahun 2021 menurun menjadi 5 penelitian. Penurunan ini mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pandemi COVID-19 yang mengalihkan fokus penelitian ke bidang lain, atau mungkin karena penelitian terkait topik ini masih dalam tahap eksplorasi awal dan belum banyak dilaksanakan.

c. 2022 (8 penelitian)

Pada tahun 2022, jumlah penelitian meningkat lagi menjadi 8 penelitian, menunjukkan adanya peningkatan perhatian kembali terhadap topik ini. Mungkin pada tahun ini, ada kebijakan atau peristiwa tertentu yang meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan anti-korupsi dalam sektor kesehatan.

d. 2023 (7 penelitian)

Pada tahun 2023, jumlah penelitian sedikit menurun menjadi 7 penelitian. Meskipun ada penurunan kecil dibandingkan tahun 2022, ini masih menunjukkan ketertarikan

yang berkelanjutan terhadap topik ini. Penurunan kecil mungkin dipengaruhi oleh prioritas penelitian lain yang muncul pada tahun tersebut.

e. 2024 (9 penelitian)

Di tahun 2024, jumlah penelitian kembali meningkat menjadi 9 penelitian. Ini menunjukkan bahwa meskipun tren penelitian sempat berfluktuasi, topik pendidikan anti-korupsi terhadap etika kerja tenaga kesehatan tetap relevan dan menjadi fokus penelitian yang penting pada tahun ini.

Pendidikan literasi anti-korupsi bagi tenaga kesehatan berpotensi memberikan dampak positif terhadap etika kerja mereka. Korupsi dalam sektor kesehatan, baik dalam bentuk suap, penyalahgunaan wewenang, maupun penggelapan dana, dapat merusak integritas dan pelayanan kesehatan yang seharusnya mengutamakan kepentingan pasien. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tenaga kesehatan tentang bahaya korupsi sangat penting (Melinda, 2024).

2. Meningkatkan kesadaran etika kerja

Pendidikan literasi anti-korupsi dapat membantu tenaga kesehatan untuk lebih memahami prinsip-prinsip etika profesional, termasuk kewajiban untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan pengetahuan ini, tenaga kesehatan diharapkan dapat menyadari pentingnya bertindak secara jujur dan menghindari praktik korupsi dalam bentuk apapun (Trisnawati & Sundari, 2020).

Pendidikan literasi anti-korupsi membantu tenaga kesehatan untuk memahami betul bahwa tindakan korupsi dapat merusak prinsip dasar dari profesi kesehatan, yaitu pelayanan yang berfokus pada kesejahteraan pasien. Hal ini menjelaskan mengapa sebagian besar responden merasa lebih bertanggung jawab terhadap tindakan etis dalam pekerjaan mereka setelah mengikuti pelatihan.

3. Penguatan nilai-nilai profesionalisme

Pendidikan anti-korupsi dapat mengintegrasikan nilai-nilai profesionalisme yang berfokus pada pelayanan publik dan moralitas. Ini mendorong tenaga kesehatan untuk mendahulukan kepentingan pasien dan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga meningkatkan kualitas dan kepercayaan terhadap sistem kesehatan (Ananta et al., 2024).

Salah satu tujuan utama pendidikan literasi anti-korupsi adalah memperkenalkan nilai-nilai profesionalisme yang sangat diperlukan dalam dunia kesehatan. Pendidikan ini tidak hanya menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya secara efisien, tetapi juga mengajarkan bagaimana prinsip-prinsip etika dalam profesi kesehatan harus dijunjung tinggi (Kurnia & Soeratin, 2023).

Dengan semakin banyaknya tenaga kesehatan yang berkomitmen untuk bekerja dengan integritas, ini berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan dan memberikan dampak positif terhadap kepuasan pasien.

4. Meningkatkan pengawasan diri dan rekan kerja

Tenaga kesehatan yang teredukasi dengan baik mengenai literasi anti-korupsi akan lebih cenderung untuk saling mengingatkan dan mengawasi rekannya dalam menjalankan tugas. Mereka akan lebih mudah menolak tawaran suap, menghindari kolusi dalam pengelolaan dana, dan bertindak proaktif dalam mencegah terjadinya korupsi di tempat kerja (Fernanda et al., 2023).

5. Pengaruh terhadap kepuasan pasien dan masyarakat

Korupsi yang terjadi di sektor kesehatan sering kali berujung pada penurunan kualitas layanan kesehatan. Jika tenaga kesehatan menerapkan prinsip-prinsip yang didapatkan

melalui pendidikan anti-korupsi, maka akan meningkatkan pelayanan dan kepercayaan pasien terhadap rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Hal ini berimplikasi pada peningkatan kepuasan pasien dan masyarakat terhadap layanan kesehatan (Muhammaf Fauzan, at al., 2021).

6. Dampak terhadap lingkungan kerja

Dengan adanya pendidikan anti-korupsi, diharapkan dapat terbentuk lingkungan kerja yang lebih bersih dan berintegritas. Lingkungan yang transparan dan bebas dari praktik korupsi akan mendorong tenaga kesehatan untuk bekerja lebih profesional dan berfokus pada perawatan pasien, tanpa ada kekhawatiran terkait tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat atau lembaga kesehatan itu sendiri (Arfa, 2023).

7. Penguatan kebijakan dan regulasi

Di sisi lain, pendidikan literasi anti-korupsi juga akan mempengaruhi tenaga kesehatan dalam mendukung kebijakan dan regulasi yang memperketat pengawasan terhadap praktik korupsi. Kesadaran mereka tentang konsekuensi hukum dan sosial dari tindakan korupsi akan mendorong mereka untuk lebih patuh pada peraturan yang ada, serta aktif mendukung inisiatif anti-korupsi di tempat kerja

Efek pendidikan literasi anti-korupsi terhadap etika kerja tenaga kesehatan, ditemukan beberapa temuan utama yang menggambarkan dampak dari pendidikan anti-korupsi terhadap perilaku dan etika tenaga kesehatan di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan.

Korupsi di sektor kesehatan dapat memiliki dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat, tenaga kesehatan, dan sistem kesehatan secara keseluruhan. Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi sangat penting untuk memastikan bahwa layanan kesehatan diberikan dengan adil, efisien, dan transparan. Salah satu upaya paling efektif untuk mencegah korupsi adalah melalui pendidikan literasi anti-korupsi yang rutin untuk tenaga kesehatan. Pelatihan ini dapat mencakup pengenalan terhadap konsep-konsep dasar anti-korupsi, hukum yang mengatur tindak pidana korupsi, serta dampak negatif korupsi terhadap kualitas pelayanan kesehatan

Berikut adalah beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi dan mencegah korupsi di sektor kesehatan, khususnya dalam konteks tenaga kesehatan:

1. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas

Implementasi sistem pengawasan yang lebih baik di rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Hal ini dapat melibatkan pengawasan oleh pimpinan, rekan kerja, dan bahkan pasien (melalui sistem pengaduan atau feedback). Transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa juga sangat penting untuk mencegah kolusi dan penggelapan dana

2. Penerapan teknologi untuk meningkatkan transparansi

Mengimplementasikan sistem informasi elektronik (e-health, e-budgeting, e-procurement) yang meminimalkan interaksi fisik dan mengurangi kesempatan untuk praktik korupsi. Penggunaan teknologi dapat mempercepat dan mempermudah pengawasan serta mengurangi kemungkinan manipulasi data atau penyalahgunaan wewenang.

3. Penegakan hukum yang tegas

Menegakkan sanksi yang tegas bagi tenaga kesehatan yang terbukti terlibat dalam tindakan korupsi. Sanksi ini bisa berupa pemecatan, pencabutan izin praktik, atau hukuman pidana. Penegakan hukum yang tegas akan memberikan efek jera dan menunjukkan bahwa tidak ada toleransi terhadap korupsi.

4. Membangun budaya kerja yang berintegritas

Penting untuk melibatkan semua pihak, mulai dari tenaga kesehatan, manajer rumah sakit, hingga pemerintah, dalam menciptakan budaya kerja yang bersih dari korupsi. Sosialisasi mengenai bahaya korupsi dan pentingnya integritas harus dilakukan secara menyeluruh di

semua level. Memberikan penghargaan atau insentif bagi tenaga kesehatan yang menunjukkan perilaku profesional dan bebas dari praktik korupsi. Ini dapat memotivasi mereka untuk terus mempertahankan standar etika yang tinggi.

5. **Penyuluhan kepada pasien dan masyarakat**
Memberikan pendidikan kepada pasien dan masyarakat tentang hak-hak mereka dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang bebas dari korupsi, serta cara melaporkan praktik yang tidak etis. Hal ini akan memudahkan deteksi dini dan pencegahan terhadap tindakan korupsi. Mengajak pasien untuk berperan aktif dalam mengawasi pelayanan yang mereka terima, seperti melalui umpan balik, survei kepuasan, atau sistem pelaporan anonim.
6. **Peningkatan sistem pengelolaan sumber daya manusia**
Memastikan bahwa proses rekrutmen tenaga kesehatan dilakukan secara transparan, dengan memilih kandidat yang memiliki nilai integritas yang tinggi dan komitmen terhadap etika profesi. Pelatihan awal yang diberikan kepada tenaga kesehatan juga harus menekankan pentingnya integritas dan anti-korupsi.
7. **Keterlibatan organisasi dan asosiasi profesi**
Organisasi dan asosiasi profesi tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam mencegah korupsi dengan mengedukasi anggotanya tentang pentingnya integritas dan penegakan kode etik. Mereka juga dapat memberikan sanksi profesi kepada anggotanya yang terlibat dalam tindakan korupsi.

Upaya pencegahan korupsi di sektor kesehatan memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan pendidikan literasi anti-korupsi, penguatan transparansi dan akuntabilitas, penegakan hukum yang tegas, serta penciptaan budaya kerja yang berintegritas. Semua pihak, baik tenaga kesehatan, pemerintah, pasien, dan masyarakat, harus berperan aktif dalam mencegah dan memberantas korupsi untuk menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang lebih baik, adil, dan transparan.

KESIMPULAN

Pendidikan literasi anti-korupsi memiliki dampak yang signifikan terhadap etika kerja tenaga kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pustaka, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. **Peningkatan kesadaran etika kerja** yaitu pendidikan anti-korupsi berhasil meningkatkan kesadaran tenaga kesehatan mengenai pentingnya menjaga integritas dan etika profesional dalam pekerjaan mereka. Dengan memahami dampak negatif korupsi terhadap kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan lebih cenderung menghindari praktik-praktik yang tidak etis, seperti suap dan kolusi.
2. **Penguatan nilai profesionalisme** yaitu literasi anti-korupsi membantu memperkuat komitmen tenaga kesehatan terhadap nilai-nilai profesionalisme yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan dedikasi pada kepentingan pasien. Pendidikan ini menanamkan pemahaman bahwa korupsi merusak prinsip dasar dari profesi kesehatan, yaitu pelayanan yang berfokus pada kesejahteraan pasien.
3. **Meningkatkan pengawasan diri dan rekan kerja** yaitu pendidikan anti-korupsi mendorong tenaga kesehatan untuk lebih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap diri sendiri dan sesama rekan kerja. Dengan kesadaran yang lebih tinggi akan pentingnya pencegahan korupsi, mereka lebih berkomitmen untuk melaporkan tindakan yang mencurigakan dan menjaga integritas dalam bekerja.

4. Peningkatan kepercayaan pasien dan masyarakat yaitu ketika tenaga kesehatan mematuhi prinsip-prinsip anti-korupsi, kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan meningkat. Pasien merasa lebih dihargai dan aman, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan.
5. Perubahan budaya kerja yaitu pendidikan literasi anti-korupsi turut berperan dalam menciptakan budaya kerja yang bersih dan transparan di tempat kerja. Lingkungan yang bebas dari korupsi meningkatkan profesionalisme dan memfasilitasi tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pasien tanpa ada tekanan atau praktik merugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananta, Z. D., Astuti, A. P., Rahayu, P. A., Ibrahim, M. J., & Anshori, M. I. (2024). Memahami tindakan diskriminasi di tempat kerja: perspektif hukum dan etika. *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 2(3), 106–120. <https://doi.org/10.30640/trending.v2i3.2638>
- Arfa, A. M. (2023). Memerangi Korupsi Melalui Pendidikan Anti-Korupsi: Membentuk Integritas, Kesadaran, Dan Kemampuan Kritis Dalam Masyarakat. *Jendela Pengetahuan*, 16(2), 128–142.
- Dianita, A., Yuni, R., Nego, A., Saputra, F., Adelia, F., Syahputra, I., & Farhan, M. R. (2024). Pendidikan Anti Korupsi Bagi Siswa Untuk Pencegahan Dini Tindakan Pidana Korupsi Di Sektor Pendidikan. *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran*, 2(1), 13–20. <https://doi.org/10.58812/spp.v2i01.283>
- Fernanda, A., Yazid, M. F., Tri, D., & Silitonga, S. (2023). Korupsi Dan Pembangunan Berkelanjutan: Evaluasi Terhadap Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi, Sosial, Dan Lingkungan Ade. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(5), 77–82.
- Hasan Madani, Agustinus, A. R. (2024). Implementasi Penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Berkenaan Tindak Pidana Korupsi dalam Mencegah Gratifikasi Praktik Kedokteran untuk Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(5), 1–23.
- Kurnia, D. S., & Soeratin, H. Z. (2023). Peran Kepemimpinan Suatu Institusi dalam Mengakselerasi Penanganan Korupsi di Era Digitalisasi 5.0 dan Sosial Media dengan Kepemimpinan Manajemen Pendidikan Islam. *Anwarul*, 3(4), 647–661. <https://doi.org/10.58578/anwarul.v3i4.1277>
- Melinda, P. B. (2024). Penyuluhan Pendidikan Anti Korupsi pada anak Sekolah Mengan Kajuruan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 20–26.
- Muhammaf Fauzan, M. (2021). *Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Bentuk Integritas Mahasiswa*. Penerbit Amerta Media.
- Sari, V. K., Akhwani, A., Hidayat, M. T., & Rahayu, D. W. (2021). Implementasi Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Antikorupsi Melalui Ekstrakurikuler dan Pembiasaan di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(4), 2106–2115. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i4.1167>
- Trisnawati, N. F., & Sundari, S. (2020). Efektifitas Model Problem Based Learning dan Model Group Investigation dalam Meningkatkan Karakter Anti Korupsi. *Mosharafa: Jurnal Pendidikan Matematika*, 9(2), 203–214. <https://doi.org/10.31980/mosharafa.v9i2.637>
- Yandi, Muhammad Adystia Sunggara, Yang Meliana, Wahab Aznul Hidayat, Sokhib Nain, & Mawrni Fatma. (2024). Dinamika Hukum dan Korupsi Politik (Dampak dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia). *Unizar Law Review*, 7(1), 35–48.

